



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	14

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

937 Rekomendasi yang Ditemukan BPK, 806 telah Ditindaklanjuti

POLIKO, METRO.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz mengikuti sosialisasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP) melalui aplikasi SIPTL, di Aula BPK Perwakilan Sumbar, Padang, Senin (14/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD

Kota Payakumbuh Wulan Denura dan Inspektur Kota Payakumbuh, Andri Narwan.

Selain mengikuti sosialisasi tersebut, Wakil Kepala Daerah dan Wakil Ketua DPRD juga menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019, Laporan Hasil Pe-

mantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019, serta Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2019.

Dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019, Kota Payakumbuh menempati urutan pertama tindak lanjut hasil rekomendasi BPK dengan tingkat persentase SSR 86%. Dari 937 rekomendasi yang ditemukan BPK, sebanyak 806 telah sesuai rekomendasi atau ditindaklanjuti.

Melalui SIPTL, tingkat persentase ini bisa dilihat secara realtime. Informasi ini bisa dijadikan acuan dalam merindaklanjuti LHP BPK yang harus diselesaikan paling lambat 60 hari setelah LHP dikeluarkan.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnadewi menyampaikan, Wakil Kepala Daerah dan Wakil Ketua DPRD yang memiliki fungsi Pengawasan dalam men-



HADIRI—Wawako Payakumbuh H.ErwinYunaz (dua dari kanan) saat menghadiri sosialisasi TLRHP

jalankan keuangan daerah, dituntut bisa memberikan dukungan dan pressure pada perangkat daerah masing-masing untuk merindaklanjuti hasil pemeriksaan.

"Terlebih lagi, tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK sekarang akan kita kelola melalui aplikasi SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. Aplikasi ini akan kita gunakan sebagai aplikasi untuk

mewujudkan keuangan daerah yang bersih dan mendukung e-government," sebut Yusna.

"Menanggapi hal ini, Wawako Erwin Yunaz menyambut baik langkah digitalisasi yang dilakukan BPK.

"Tentunya akan memberikan kemudahan bagi daerah untuk merindaklanjuti hasil pemeriksaan. Tidak perlu lagi menggunakan kertas-kertas yang banyak sehingga lebih hemat," ujar Wawako. (us)